

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Adrian, Ade, 2020, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Porses Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Agus Rusianto, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, 2020, Wawancara oleh Modesta Fiska jurnalis surat kabar suara merdeka.com, <https://www.suaramerdeka.com/news/liputan-khusus/234597-beradaptasi-dengan-persidangan-online-selama-pandemi>.
- Ali, Zainudin, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika.
- Astuti, Endang Puji, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 04 Januari 2021.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta.
- Basuki, Ahmad, 2013, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 1 2013.
- Borman, M. Syahrul, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Dr. Soetomo.
- Brata, Desak Paramita dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana*, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020).
- D., Soedjono, 1983, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Bandung: Alumni.
- Dillah H. Phillips & Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Fajriana, Norika, 2018, *Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Badamai Law Journal Vol. 3 Issues 1 (Maret, 2018).
- Fariz , A.Z. Abidin, 1980, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Jakarta: Makalah.

- Fauzan, Aziz Dwi Rizky, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya dengan Kemerdekaan Pers*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermanto, Bambang, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 20 Januari 2021.
- Husin Budi Rizki & Kadri Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Iswantoro, Wahyu, 2020, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik Volume 6 No 1 ISSN: 2685-6816 (Juni, 2020).
- Kadir, Abdul, 2005, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Press.
- Kompas.com, 2020, *Menyoal Payung Hukum Persidangan Online*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all>.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2020, *Proses Persidangan Pengadilan Harus Tetap Terbuka Untuk Umum Meskipun Dilaksanakan Secara Online Akibat Wabah Pandemi Virus Covid-19*, dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidangan-pengadilan-harus-tetap-terbuka-untuk-umum-meskipun-dilaksanakan-secara-online-akibat-wabah-pandemi-virus-covid-19/>.
- Lemek, Jeremias, 2009, *Penuntun Praktis Pembuatan Pledoi Jilid 2*, Yogyakarta: New Merah Putih.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Merpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pamungkas, Ageng Priambodo, 2017, *Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Tindak Pidana Perjudian Sebagai Kejahatan Kesusilaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purbalingga)*, Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Volume 3 No.2
- Poernomo, Bambang, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amerta Buku.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1992, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Semarang: Aneka.
- Reda Mantovani, *Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*, dalam situs hukumonline.com, Rabu, 15 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ed2e58d0d9/menelisik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani/> .
- Reksodipuri, Marjo, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Depok: UI-Press.
- Rosana, Elly, 2013, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 (Januari-Juni 2013).
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV Mandar Maju.

Simamora, Janpatar, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014.

Soesilo, R., 1983, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Pelita.

Suharto, Efendi Jonaedi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Taufani Galang & Suteki, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Triyogo, Bagus, Penasehat Hukum, Wawancara Pribadi, Surakarta 15 Desember 2020.

Wisnubroto, Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : PT Galaxy Puspa Mega.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas Dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-009/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1007/III/HUK.5/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi. Negeri, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM/ Kalapas dan Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri pada daerah hukum masing-masing untuk melakukan penundaan pelimpaha tersangka dan barang Bukti Tahap II

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilsi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Lembaga sandi Negara tentang Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, Nomor: 1/NK/MA/1/2016, Nomor: NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016, Nomor: B/6/1/2016, Nomor: KEP-

022/A/JA/01/2016, Nomor: M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor: 096/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016, Nomor: NKB 01/M.PPN/01/2016, Nomor: PERJ.8./SU/KH.02.01/01/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Perjanjian Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.